

ABSTRAK

KPPU merupakan lembaga independen yang dapat dikatakan memiliki yurisdiksi yang sangat luas, termasuk yudikatif. Di antara sekian banyak kewenangan yang dimiliki KPPU, ada satu yang memperjelas posisi KPPU sebagai lembaga pemerintah yang independen dengan fungsi yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan serta merumuskan keputusan terkait kerugian para pemilik bisnis lain atau khalayak ramai. Metode penelitian yang diterapkan yakni yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji teori, konsep dan perundang-undangan. Penelitian ini juga akan membahas mengenai pelaksanaan putusan oleh KPPU pada proses perkara persaingan bisnis yang kurang sehat serta perbandingan upaya hukum yang dijalankan para pebisnis apabila tidak menerima hasil putusan dari KPPU di Indonesia dengan CCCS di Singapura. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa KPPU bukanlah sebagai lembaga peradilan melainkan menjadi pihak pengawas penerapan UU No. 5 Tahun 1999, sehingga KPPU tidak memiliki otoritas untuk dapat melaksanakan eksekusi putusannya sendiri melainkan harus meminta penetapan eksekusi terhadap pihak Pengadilan Negeri. Apabila pengusaha tersebut melakukan penolakan terhadap putusan KPPU, dapat diajukan keberatan ke PN dan kasasi ke MA. Sedangkan di Singapura, dapat diajukan upaya hukum keberatan ke CAB. Yang selanjutnya dapat mengajukan upaya banding ke *High Court* serta kasasi ke *Court of Appeal*.

Kata Kunci : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan, Upaya Hukum

ABSTRACT

KPPU is an independent institution that can be said to have a very broad jurisdiction, including the judiciary. Among the many powers possessed by the KPPU, there is one that clarifies the KPPU's position as an independent government institution with a judicial function, namely the power to make decisions and formulate decisions related to losses to other business owners or the general public. The research method applied is normative juridical, namely a research method that examines theories, concepts and legislation. This research will also discuss the implementation of decisions by the KPPU in cases of unfair business competition as well as a comparison of legal remedies carried out by business people if they do not accept the results of decisions from KPPU in Indonesia and CCCS in Singapore. The results found in this study are that the KPPU is not a judicial institution but a supervisory party to the implementation of Law no. 5 of 1999, so that the KPPU does not have the authority to be able to carry out the execution of its own decisions but must request an execution order against the District Court. If the entrepreneur rejects the KPPU's decision, an objection can be submitted to the District Court and an appeal to the Supreme Court. Meanwhile in Singapore, an objection can be submitted to the CAB. Those who can then submit an appeal to the High Court and cassation to the Court of Appeal.

Keywords : *Commission for the Supervision of Business Competition, Decision, Legal Action*